

**ABSTRAK**

Kebijakan retribusi tarif sewa rusunawa merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pengelolaan aset secara lebih efektif sehingga mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah serta menekan terjadinya penyimpangan- penyimpangan dalam pengelolaan aset. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah yang sudah seharusnya diawasi dan di evaluasi dalam pelaksanaannya sehingga dapat mengetahui hasil dari keseluruhan pelaksanaan kebijakan tersebut. Serta dapat mengetahui penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan sehingga dapat dicari solusi atas permasalahan tersebut. Evaluasi sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kebijakan retribusi tarif sewa rusunawa Urip Sumoharjo serta untuk mengetahui hambatan dan penyimpangan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan retribusi tarif sewa rusunawa di Kota Surabaya, dan Rusunawa Urip Sumoharjo sebagai pihak kedua dalam pembayaran retribusi tarif sewa rusunawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sedangkan teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* yang kemudian berkembang dengan menggunakan teknik *snowball*. Hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan retribusi tarif sewa rusunawa di Urip Sumoharjo Kota Surabaya dinilai kurang optimal dilihat dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah unit rusunawa Urip Sumoharjo yang membayar retribusi tarif sewa hanya empat unit dari 120 unit keseluruhan rusunawa dan semakin meningkatnya jumlah jumlah unit rusunawa yang tidak membayar retribusi tarif sewa dari tahun ketahun.

**Kata Kunci :** *Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Peraturan Daerah, Rumah Susun Sederhana*

**ABSTRACT**

The rusunawa rental rate levy policy is one of the efforts of the Surabaya City government to improve asset management more effectively so as to be able to optimize local revenue and reduce the occurrence of irregularities in asset management. This policy is a government policy that should be monitored and evaluated in its implementation so that it can know the results of the overall implementation of the policy. And can find out the irregularities that arise in the implementation of policies so that solutions can be sought for these problems. Evaluation is very necessary in implementating a policy, so that the implementation of the policy can run in accordance with the stipulated provisions. The purpose of this research is to evaluate how the implementation of Urip Sumoharjo rusunawa lease tariff policy is implemented and to find out what obstacles and deviations arise in implementing the policy. The location taken in this research was the Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya as the party responsible for the implementation of the rusunawa rental rate levy policy in Surabaya City, and Urip Sumoharjo Rusunawa as the second party in paying rusunawa rental tariff levies. This study uses qualitative research methods with descriptive research type. While the technique of determining informants is done by purposive sampling which then develops using the snowball technique. The results of the study concluded that the implementation of the rusunawa rental rate levy policy at Urip Sumoharjo in Surabaya City was considered to be less than optimal in terms of the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. This is evidenced by the number of Urip Sumoharjo rusunawa units that pay levies levy rates of only four units from 120 units of total rusunawa and the increasing number of rusunawa units that do not pay levies on rental rates from year to year.

***Keywords:*** *Policy Evaluation, Implementation of Policies, Regional Regulations, Rumah Susun Sederhana*